

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan (Lukman Dendawijaya, 2009:14). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*). Selain itu bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Hasibuan, Malayu. S.P.2005: 4). Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari *surplus unit* dan penyalur kredit kepada *deficit unit*, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hasibuan, Malayu.S.P.2005: 3).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank Syariah). Perbankan Syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan.

Adanya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Sehingga puluhan bank konvensional banyak yang ditutup dan dimerger, sementara bank syariah justru berkembang. Sebelum krisis hanya ada 1 Bank Umum Syariah (BUS) dan 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pada tahun 2006 sudah menjadi 3 BUS, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 105 BPRS (Novianto, 2008). Berdasarkan Direktori Syariah Republika (edisi Februari 2008), hingga akhir 2007 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), serta terdapat 711 Kantor Bank Syariah. Pencapaian ini tidak lepas dari adanya dukungan pemerintah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah yaitu sistem *Office Channeling* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan

Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006, sistem ini memberikan peluang bagi bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memberikan pelayanan transaksi syariah tanpa perlu membuka cabang UUS di berbagai tempat.

**Tabel 1.1 Jumlah Bank Umum Syariah
Periode tahun 2007 – 2012 adalah sebagai berikut :**

indikasi	2007 Kpp/uus	2008 Kpp/uus	2009 Kpp/uus	2010 Kpp/uus	2011 Kpp/uus	2012 Kpp/uus
BUS	3	5	6	8	9	12
UUS	25	27	28	30	35	35
BPRS	114	132	139	139	141	144

Sumberdata : statistik perbankan syariah tahun 2013, yang sudah di olah

Keterangan:

BUS : bank umum syariah

UUS : unit usaha syariah

BPRS : bank pengkreditan rakyat syariah

KPP/ UUS: kantor pusat/ unit usaha syariah

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2013 (Desember 2013). Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank pada tahun 2009 mengalami penurunan karena pada tahun itu sedang mengalami krisis global maka perekonomian akan menurun dan ini akan menyebabkan terhadap bank umum syariah akan mengalami perkembangan yang turun, maka pada Desember 2013 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 11 bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 92 unit pada periode tahun 2013.

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah

merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhamad, 2005:16).

Menurut Baraba (dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2 No. 3: 5), bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposito atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan (fungsi opsional). Selain itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas

merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Syofyan, 2002). Semakin tinggi profitabilitas bank syariah maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai macam variabel yang diambil dari laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan tersebut menghasilkan sejumlah rasio keuangan yang dapat membantu para pemakai laporan keuangan dalam menilai kinerja bank syariah. Bank syariah dalam memenuhi kecukupan modalnya dan dana-dana pihak ketiga, sehingga masuk kedalam rekening modalnya

Sistem perbankan yang sehat dinilai dari kinerja keuangan bank yang baik. Kinerja keuangan bank yang sehat dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat begitu pula sebaliknya, penurunan kinerja keuangan bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Perbankan di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Kegiatan usaha bank konvensional berdasarkan pada pembayaran bunga, sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008). *Dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu parameter ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah perbankan adalah biaya operasional. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau menggunakan tingkat input yang minimum dengan

tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasinya alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian.

Dalam perspektif makro, industri perbankan yang efisien dapat mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dan secara keseluruhan stabilitas sistem keuangan. Hal ini disebabkan peran strategis industri perbankan sebagai intermedator dan produser jasa-jasa keuangan. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, kinerja perbankan akan semakin lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi adalah ukuran penting dari kondisi operasional bank dan merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah perbankan. Efisiensi juga bisa jadi solusi atau jawaban atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja. Efisiensi bank merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisa *performance* suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasi alokasi *input* dan *output*, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab inefisiensi antara lain, diakibatkan oleh alokasi dan yang kurang sempurna pada kegiatan operasional.

Efisiensi dapat dilihat dari dua macam, yaitu biaya (*cost efficiency*) dan keuntungan (*profit efficiency*). Adapun *profit efficiency* dibedakan menjadi dua yaitu *standar profit efficiency* dan *alternatif profit efficiency*. Indikator efisiensi

dapat dilihat dengan memperhatikan besarnya rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *rasio non performing financing* (NPF). Kinerja perbankan dapat dikatakan melakukan efisiensi pada rasio BOPO dan NPF mengalami penurunan.

Jadi, pengidentifikasian efisiensi selain dengan alokasi *input* yang tepat untuk menghasilkan *output* yang maksimal, efisiensi juga dapat dilihat dengan memperhatikan besarnya rasio keuangan dan indikator kinerja perbankan, salah satunya adalah rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan rasio rentabilitas bank dalam memperoleh keuntungan atas sumber-sumber dan yang dimiliki atau bisa biasa disebut dengan Return On Asset (ROA).

Efisiensi ekonomi terdiri dari efisiensi teknis (*technical efficiency*) dan efisiensi alokasi (*allocative efficiency*). Efisiensi teknis merupakan kombinasi antara kapasitas dan kemampuan unit kegiatan ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum dari input – input dan teknologi yang tetap. Efisiensi alokasi merupakan kemampuan dan kesediaan unit ekonomi untuk beroperasi pada tingkat nilai produk marjinal (*marginal value product*) sama dengan biaya marjinal (*marginal cost*). Ada tiga kegunaan mengukur efisiensi. Pertama, sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah memperbandingkan antara unit ekonomi satu dengan yang lainnya. Kedua, apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor – faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi. Ketiga, informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena manajer dapat menentukan kebijakan perusahaan secara tepat.

Semakin rendah rasio BOPO, maka semakin efisien bank tersebut dalam operasionalnya. Dengan rasio sebesar 93,52% batas maksimum yang dapat diterolir oleh Bank Indonesia. Jika besarnya rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tapi apabila angka rasio BOPO mendekati 75% ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi yang tinggi. Sebaliknya dengan angka rasio ROA, semakin besar angka yang menunjukkan rasio ROA. Maka semakin efisien suatu bank dalam mengelola asetnya. Berikut ini tabel 1.2 yang menyajikan rasio BOPO dan ROA pada Bank Umum Syariah periode 2009-2013 :

Tabel 1.2
Data Rasio Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) periode 2009-2013

Rasio Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)					
	2009	2010	2011	2012	2013	Mean
BOPO	84,39%	82,38%	81,65%	76,35%	83,88%	81,73%
ROA	1,48%	1,59%	1,20%	1,94%	1,43%	1,53%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah Desember 2013 (data diolah).

Data diatas menunjukkan bahwa, rata-rata BOPO pada Bank Umum Syariah (81,73). Serta nilai ROA pada Bank Umum Syariah (1,53%).

Biaya Operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin rendah tingkat rasio biaya operasional bank, berarti bank makin mampu mengefisiensikan biaya dan meningkatkan pendapatan. Dalam penelitian ini menggunakan efisiensi teknis, yang mencerminkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan *output* dengan sejumlah *input* yang tersedia. Besarnya efisiensi dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya karena faktor bagi hasil, dana pihak ketiga, market power, dan size (ukuran).

Berdasarkan paparan tersebut, saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Masalah penelitian ini saya rumuskan dengan judul **“Faktor-Faktor Penentu Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap biaya operasional perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2013?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap biaya operasional perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2013?
3. Apakah market power berpengaruh terhadap biaya operasional perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2013?
4. Apakah size (ukuran) berpengaruh terhadap biaya operasional perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2013?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap biaya operasional perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2013
2. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap biaya operasional perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2013

3. Mengetahui pengaruh market power terhadap biaya operasional perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2013
4. Mengetahui pengaruh size (ukuran) terhadap biaya operasional perbankan syariah tahun 2010-2013

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Praktisi :

Memberikan informasi tentang kinerja (tingkat efisiensi) bank syariah di Indonesia. Pemberian masukan kinerja perbankan syariah sehingga dapat dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakankoreksi untuk meningkatkan kinerja perbankan pada periode tersebut

Teoritis :

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi baiya operasional perbankan syariah di Indonesia.